



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

NOTA DINAS

Kepada : 1. PPTK Di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
2. Ketua Tim Di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Dari : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tanggal : 04 Maret 2024
Nomor : 500.13/499 - DISPAR/2024
Perihal : **Rapat Pembahasan Persiapan Evaluasi SAKIP 2023**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Nomor 5.000.8.6.3/654/ORB/2024 tertanggal 28 Februari 2024 perihal Rapat Pimpinan dalam rangka Persiapan Pelaporan SAKIP ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang PPTK dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Rapat Lantai 3 Dinas Pariwisata
Provinsi Banten
Catatan : Membawa dokumen pendukung kinerja
Capaian (info grafis/gambar kegiatan)

Sehubungan dengan pentingnya acara dimaksud, mohon kiranya Saudara hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Demikian disampaikan, terima kasih atas kerjasamanya

**SEKRETARIS,**
Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP
NIP. 19670616 200112 1 003

Tembusan Yth :
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

NOTA DINAS

Kepada : 1. Para Kepala Bidang;
2. Para Fungsional / Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
3. PPTSK Pelaksana Kegiatan.

Dari : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Tanggal : 19 September 2024

Nomor : 30.13/1496 - Dispar / 2024

Perihal : **Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai pencapaian program serta efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024

Waktu : 08.30 WIB s.d Selesai


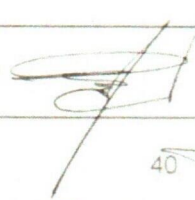
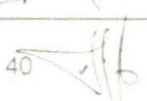
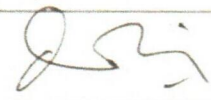

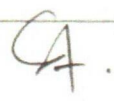
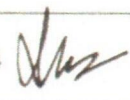
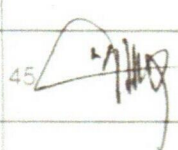
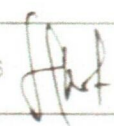


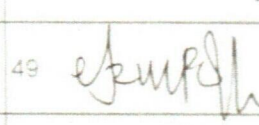
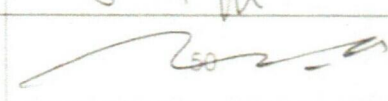
Tempat : Ruang Rapat KEK Dinas Pariwisata
Provinsi Banten.

Sehubungan dengan pentingnya acara dimaksud, mohon kiranya Saudara hadir tepat waktu.

Demikian disampaikan, terima kasih atas kerjasamanya

 **SEKRETARIS,**
Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP
NIP. 19670616 200112 1 003

Tembusan Yth :
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
38	Febri	keu	38 
39	ARIF KURUHANU	Per	39 
40	Hon Rista	smf keu	40 
41	DIAN. NOVITA	staf keu	41 
42	Puji. S	keu	42 
43	Sekar Putri	keu	43 
44	Shalehuddin	keu	44 
45	Rudi jamaru	keu	45 
46	Alwi	"	46 
47	Iman Fatori	staf	47 
48	Peru		48 
49	Arum Puspa	staf umpas	49 
50	Noor. A	PEP	50 





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

NOTULEN

Kegiatan / Rapat : Rapat Pembahasan Persiapan Evaluasi SAKIP
Hari / Tanggal : Rabu / 6 Maret 2024
Waktu : 09.00 s.d 10.00 WIB

Pemandu Rapat : Sekretaris Dinas
Peserta Rapat : PPTK dan Pembantu PPTK

I. PEMBUKAAN :

1. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas Pariwisata, selaku koordinator kegiatan SAKIP
2. Dalam arahnya mengharapkan agar pelaksanaan kegiatan di triwulan I dapat sesuai dengan target dan capaian

II. PEMBAHASAN :

- a. Mempersiapkan bahan pendukung evaluasi SAKIP ;
 1. Mempersiapkan laporan capaian kinerja
 2. Mempersiapkan dokumen pendukung kegiatan
 3. Berkoordinasi secara intens dengan evaluator SAKIP
 4. Mempersiapkan teknis sarana dan prasarana evaluasi SAKIP
- b. Pembahasan dilakukan mengenai ;
 1. Melihat aturan dan ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan SAKIP
 2. Mengukur indikator kinerja yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dalam pencapaian kinerja SAKIP
 3. Mengukur nilai serta hasil kemanfaatan atas pelaksanaan kegiatan SAKIP

III. KESIMPULAN :

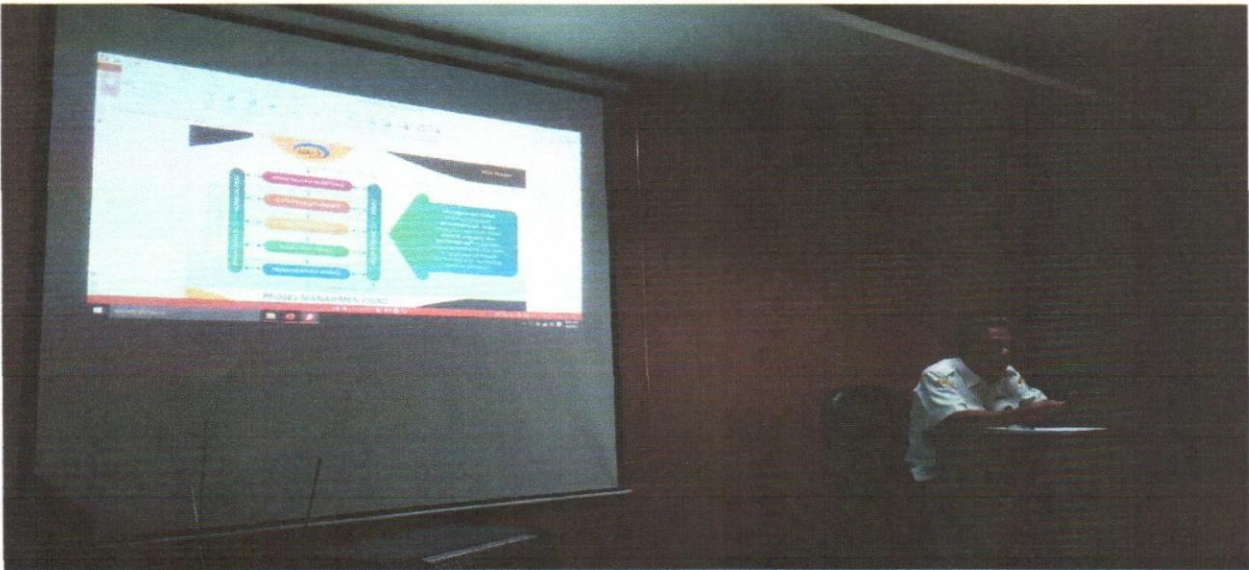
Pengukuran kinerja evaluasi SAKIP akan dilakukan oleh verifikatur SAKIP Bappeda dan akan menilai keberadaan, hasil dan manfaat atas apa yang telah dilaksanakan. Demikian notulensi ini dibuat, mohon arahan lebih lanjut.

Serang, 8 Maret 2023

NOTULIS

Chairul Anwar, A.Md

NIP. 19810709 201001 1 013



DAFTAR HADIR

Rapat Persiapan Penyusunan SAKIP Kegiatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Hari / Tanggal : Rabu / 06 Maret 2024

Tempat : Ruang Rapat Dinas Pariwisata Provinsi Banten

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	Tb. GMCEP	Sekelbis	1
2	Gumarsano	JF Perencana	2
3	Chaial Anwar	PEP	3
4	INA INAYAT	JF-Perencana	4
5	Firman Taro	CDM	5
6	Sri H	JF-Atyama peminat	6
7	Rahm Mhen Sanyo	JF-Andas Peminat	7
8	Mungah Jora	Relat-sana	8
9	Efendi 2.	Destinasi	9
10	Sup Liba	Induk-leaf	10
11	Berio Aryo S.	Reg PEP	11
12	Nawat	Destinasi	12
13	Edwin H.	Ruang	13
14	Toni Ismaiti	Kabid Destin	14
15	Herman N M	Staf Manajemen	15
16	Een Kustini	umum	16
17	Hadi Sefat	Destinasi	17



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

NOTULENSI

Kegiatan / Rapat : Rapat Evaluasi Kegiatan Kinerja
Hari / Tanggal : Senin / 23 September 2024
Waktu : 08.30 WIB s.d Selesai
Pimpinan Rapat : Sekretaris Dinas
Peserta Rapat : 1. Para PPTK dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
2. Fungsional / Ketua Tim
3. Staf Pelaksana

I. PEMBUKAAN :

1. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten
2. Evaluasi kinerja perlu dilakukan sebagai bahan atas pelaksanaan realisasi kinerja dan target yang telah ditetapkan.
3. Sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam mendukung upaya peningkatan capaian kinerja SAKIP

II. PEMBAHASAN :

Pada triwulan III tahun anggaran 2024, Dinas Pariwisata Provinsi Banten melakukan evaluasi kinerja untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah poin-poin penting dari evaluasi tersebut:

1. **Target Kinerja:** Ditetapkan sejumlah target yang mencakup peningkatan kunjungan wisata, promosi destinasi, dan pengembangan pariwisata sebagai target kinerja outcome Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
2. **Capaian Kinerja:** Hingga triwulan III, capaian kinerja menunjukkan persentase "70% dari target yang ditetapkan. Beberapa program berhasil mencapai target, sementara ada beberapa yang masih perlu perhatian lebih.
3. **Rekomendasi:**
 - o Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder terkait dengan pelaksanaan kinerja fisik maupun non fisik
 - o Melakukan evaluasi berkala untuk program yang belum mencapai target
 - o Memperbaiki manajemen anggaran dan realisasi keuangan agar lebih efektif sehingga apa yang direncanakan dapat terelisasi dengan baik.

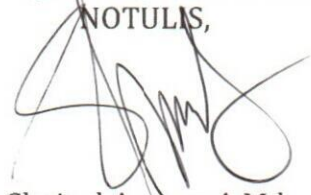
III. KESIMPULAN :

Evaluasi kinerja menunjukkan bahwa meskipun ada capaian positif, masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah perbaikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata ke depannya.

Demikian notulensi ini dibuat, mohon arahan lebih lanjut

Serang, 23 September 2024

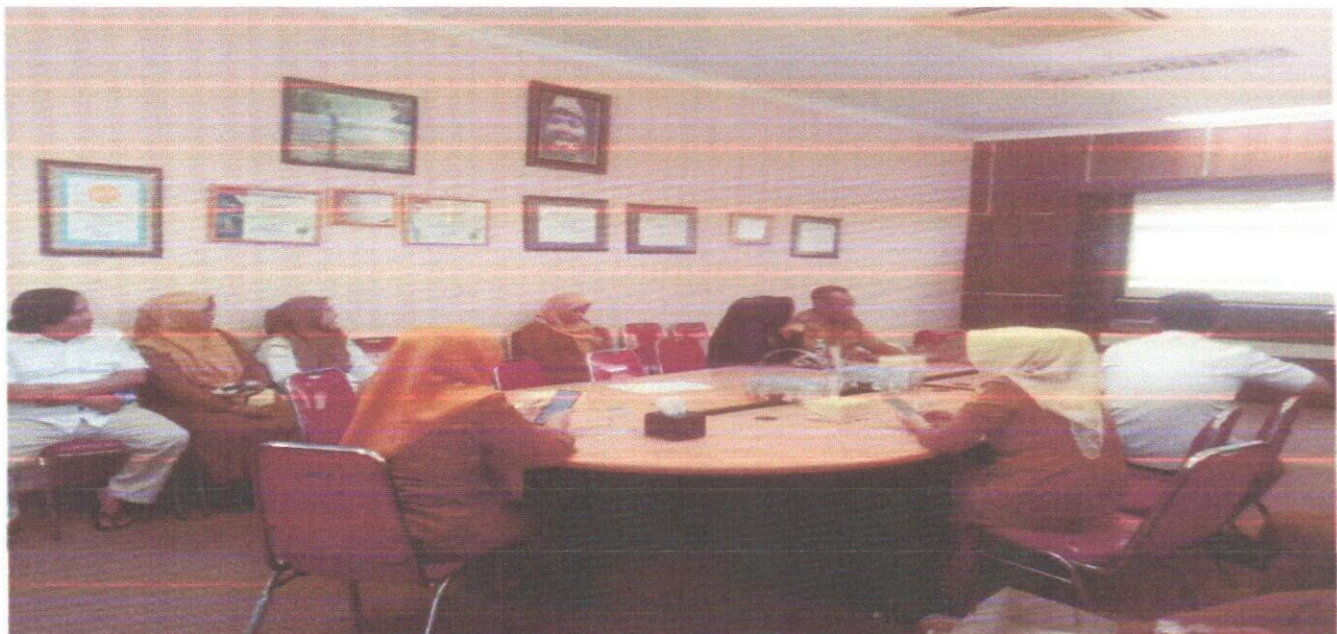
NOTULIS,



Chairul Anwar, A.Md

NIP. 19810709 201001 1 013

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

NOTULEN

Kegiatan / Rapat : Rapat Evaluasi SAKIP
Hari / Tanggal : Rabu / 28 Juni 2024
Waktu : 09.00 s.d 10.00 WIB

Pemandu Rapat : Sekretaris Dinas
Peserta Rapat : PPTK dan Pembantu PPTK

I. PEMBUKAAN :

1. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas Pariwisata, selaku Koordinator SAKIP.
2. Dalam arahan selaku perwakilan Kepala Dinas mengharapkan agar pelaksanaan penyusunan kinerja SAKIP bulan Juni 2024 dapat berjalan sesuai aturan dan ketentuan berlaku dan terverifikasi dengan baik oleh verifikatur.

II. PEMBAHASAN :

- a. Mempersiapkan bahan pendukung SAKIP ;
 1. Mempersiapkan eviden dokumen rapat persiapan dan pelaksanaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada masing – masing unit kerja.
 2. Melakukan pengecekan target kinerja Bulan Juni 2024 melalui matrik pembobotan dan kesesuaian target dan realisasi pada sistem e SAKIP (simral.bantenprov.go.id)
 3. Mengingatkan kepada PPTK maupun perwakilannya agar segera melakukan upload kinerja pada sistem e SAKIP (simral.bantenprov.go.id)
 4. Memberikan masukan terhadap kegiatan yang diperkirakan akan mengalami kendala untuk melakukan penanganan segera melalui pemberian keterangan logis yang dapat memenuhi harapan verifikatur.
- b. Pembahasan dilakukan mengenai ;
 1. Target dan capaian
 2. Realisasi dan hambatan
 3. Eviden kinerja yang sesuai

III. KESIMPULAN :

Berdasarkan evaluasi kinerja SAKIP di dapatkan informasi bahwa 80 % pelaksanaan kegiatan di Bulan Juni 2024 (Triwulan II) terlaksana sesuai dengan rencana target pelaksanaan sementara terkait kendala dan hambatan di dapatkan informasi ada pada teknis pelaksanaan yang umumnya dilakukan oleh pihak ke II (penyedia).

Demikian notulensi ini dibuat, mohon arahan lebih lanjut.

Serang, 28 Juni 2024

NOTULIS

Chairul Anwar, A.Md

NIP. 19810709 201001 1 013





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Bidang, Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pariwisata
Provinsi Banten
Dari : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tanggal : 20 Juni 2024
Nomor : 001 / 1090 - Dispar / 2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Responsif Gender

Memperhatikan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian, Intern Pemerintah dimana Instansi Pemerintah yang didalamnya termasuk Perangkat Daerah melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat KEK Dinas Pariwisata Provinsi
Banten

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


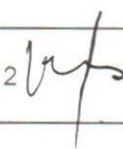
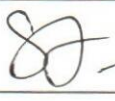

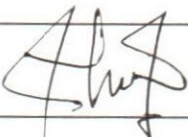
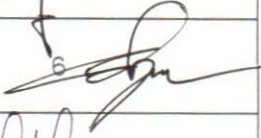
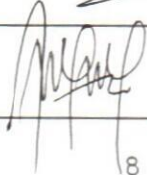





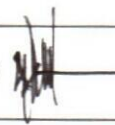



Kepala Dinas




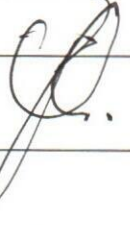
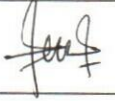

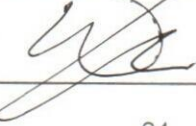
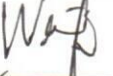



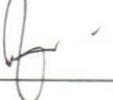
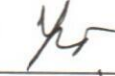


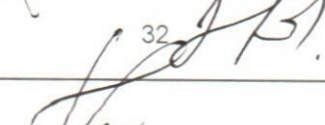

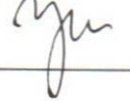
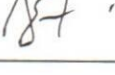
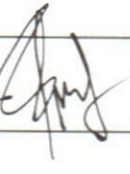

H. Al Hamidi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19640817 198603 1 022

DAFTAR HADIR

Rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan
Kegiatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Hari / Tanggal : Rabu / 12 Juni 2024
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pariwisata Provinsi Banten

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	TUNUL IASNIATUN	Kabir Destinasi	1 
2	Hadis Dafar	staf Destinasi	2 
3	ERI SUATRIKA	J.F.	3 
4	Tb.EMGE.F	Staf	4 
5	INA INAYAT	Perencana	5 
6	EDWIN HARMIND	Staf Kas	6 
7	Sup Wah	Adyptama Pariwisata	7 
8	Daris Saran		8 
9	H. ALHAMIDI	KADIS PAR	9 
10	RENO	Staf	10 
11	JEFFRI	Staf	11 
12	RIFAL.F	Staf UMREG	12 
13	S. Adiprana	Staf PDTW	13 
14	Endah Ic	Staf	14 
15	Rnki.1	staf KSPD	15 
16	R. S Azizah	Staf PDTW	16 

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	Agus Ariana	Staf Pemas	17 
18	Herman Maulana	Staf Perencanaan	18 
19	Supri Bahin	Staf Umpan	19 
20	Imawati	Staf Eksp	20 
21	Iman Sopran	Staf Eksp	21 
22	Sri H	P. Azyan Rensis	22 
23	A. Rizal M.	Physiologi	23 
24	Wening Anten A.	Staf Eksp	24 
25	Eudang	Physiologi	25 
26	Juniswati	JF.	26 
27	Yunos	Staf	27 
28	Budi	—	28 
29	Kongki	—	29 
30	Mutudin	—	30 
31	A. Rohman	—	31 
32	Mungah J. M	—	32 
33	Haron	Staf	33 
34	Lily Hanan	Staf	34 
35	Een Kustini	Arsiparis	35 
36	Anwar	Staf Pdp	36 
37	Sumarsono	Perencana	37 



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Dari : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tanggal : 24 Juni 2024
Perihal : **Laporan Responsif Gender 2024 Semester I**

NOTULENSI

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti hasil rapat perencanaan penganggaran responsif gender yang diselenggarakan diruang rapat KEK Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tanggal 24 Juni 2024, bersama ini kami laporkan poin – poin penting sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Banten yang dihadiri oleh beberapa pejabat eselon III dan pejabat fungsional dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Sebagian berhalangan hadir dikarenakan adanya kegiatan lain yang bertepatan waktunya sehingga sebagian besar peserta adalah para staf dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

II. PEMBAHASAN

Berikut ini kami sampaikan beberapa hasil catatan penting dalam pembahasan rapat perencanaan penganggaran responsif gender sebagai berikut :

- ✓ Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Pembangunan Kesenjangan Gender (KG). Sangat disadari, sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Padahal salah satu tujuan pembangunan manusia (human development) di Indonesia adalah untuk mencapai KG dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun Perempuan.
- ✓ Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai salah satu dari 4 (empat) bidang yang menjadi prioritas pembangunan daerah, berpeluang untuk mengoptimalkan program pengarusutamaan responsif gender (PUG) disetiap kegiatannya berdasarkan data terpilah yang dimiliki sehingga pada pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata telah beresponsif gender.

- ✓ Hal pertama yang diperlukan dalam penanganan gender di sektor pariwisata adalah data pembuka wawasan / profil pariwisata berbasis gender. Hal ini diperlukan sebagai syarat serta prasyarat dalam mengolah dan memilah perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).
- ✓ Latar belakang mengapa Pemerintah Pusat maupun Daerah melaksanakan pengarusutamaan gender salah satunya adalah terdapat pada 2 (dua) komitmen yaitu ;
 - a. komitmen nasional
 - secara filosofis telah diamanati oleh Pembukaan UUD 1945 dalam “untuk mewujudkan cita – cita negara”
 - secara yuridis pelaksanaan pengarusutamaan gender didasarkan pada peraturan perundangan
 - secara struktur dan operasional telah berpijak pada RPJPN, RPJMN, RPJMD, Renstra, RKPD.
 - Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional
 - b. komitmen internasional.
 - MDG'S yang telah merubah namanya menjadi SDG'S tentang kesetaraan gender
 - Beijing platform for action (BPFA) 12 Kritis Area
 - Planet 50 : 50 gender equality pada tahun 2030 (UN Women pada sidang umum PBB tahun 2015).
- ✓ Apabila data telah terhimpun maka akan memudahkan organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pariwisata untuk memulai tahapan penyusunan gender yang terdiri dari ; gender analysis pathway (GAP), gender budgeting statement (GBS) dan term of reference (TOR).
- ✓ Setelah poin (1 dan 2) tersedia maka organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pariwisata akan mudah melaporkan kegiatan pengarusutamaan gender tersebut melalui dokumen anggaran responsif gender (ARG) kepada tim perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) yang dikoordinatori oleh Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
- ✓ Adanya persepsi yang keliru terkait penanganan gender dikalangan masyarakat umum maupun aparatur yang selalu diidentifikasikan dengan perempuan dan disertai anggaran khusus.

- ✓ Kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagaimana yang diatur dalam aturan dan Perundang – undangan yang berlaku tidak terbatas pada pengelolaan destinasi wisata semata melainkan dapat menyentuh keseluruhan proses pariwisata dan hal ini digambarkan dengan peran gender dapat dilaksanakan dimulai dari wisatawan melakukan perjalanan wisata dari pemberangkatan, tujuan perjalanan hingga kepulangan wisatawan itu sendiri dan hal ini tercermin dari definisi pariwisata “kegiatan berpergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi”.
- ✓ Unsur – unsur pariwisata yang banyak terdiri atas 13 jenis usaha pariwisata memungkinkan Dinas Pariwisata untuk melakukan koordinasi dan kerjasama multisektor dalam rangka menangani permasalahan gender yang ada sebagai contoh keberadaan dan penggunaan sarana toilet umum di areal SPBU atau rest area yang apabila dicermati masih terlihat antrian yang banyak pada toilet wanita bila dibandingkan dengan toilet pria.
- ✓ Sementara dipandang dari urgensi kepariwisataan dampak pariwisata dapat digolongkan menjadi 4 (empat) pengarusutamaan meliputi :
 - a. Sebagai penopang sektor perekonomian masyarakat setempat
 - b. Tenaga kerja sektor pariwisata memiliki kontribusi memajukan wisata di daerahnya
 - c. Apabila kesenjangan / ketimpangan peran sumber daya perempuan dan laki – laki dalam memperoleh akses kegiatan usaha kepariwisataan maka akan timbul permasalahan gender
 - d. Perempuan yang terlibat dalam usaha kepariwisataan dapat memberikan kontribusi penghasilan bagi keluarganya
- ✓ Dalam dunia kerja, identitas gender sangat dipengaruhi oleh berbagai stereotype yang umumnya menempatkan laki-laki sebagai nafkah utama, pekerja trampil, bertenaga kuat, dan berkompetensi teknis. Sebaliknya perempuan sebagai pekerja sekunder, tidak trampil, berfisik lemah, dan tidak mempunyai kompetensi teknis.

III. KESIMPULAN

Dengan mengoptimalkan kegiatan responsif gender pada sektor pariwisata diharapkan memiliki dampak kontribusi positif pada multisektor lainnya yang terkoneksi dengan proses bussines pariwisata di Banten.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten selaku OPD yang menjadi prioritas pembangunan daerah di Provinsi Banten diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan perencanaan pengarusutamaan responsif gender (PPRG) dengan cara melakukan penyusunan data terpilah / data pembuka wawasan yang responsive gender.

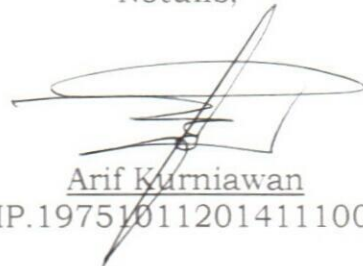
Upaya pengumpulan dan pengolahan kegiatan responsif gender ini tidak mungkin berjalan apabila tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai salah satunya adalah ketersediaan pengolah data / *focal poin* gender yang tersedia di OPD yang konsisten dan komitmen terhadap perencanaan pengarusutamaan responsif gender (PPRG).

IV. PENUTUP

Demikian notulis ini disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Serang, 25 Juni 2024

Notulis,



Arif Kurniawan
NIP.197510112014111001

DOKUMENTASI

Bidang Destinasi



Bidang Ekraf



Bidang SDM



Bidang Pemasaran







PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syeh Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax (0254) 267060,267070

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
Dari : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tanggal : 12 Juni 2024
Lampiran : -
Perihal : Notulensi Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada Semester I

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Semester I yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 bertempat di ruang rapat Dinas Pariwisata Provinsi Banten, bersama ini kami laporkan hasil pelaksanaan sebagai berikut

PESERTA RAPAT

- Rapat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten
- Peserta Rapat terdiri dari para Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten serta para staf pelaksana.

PEMBAHASAN

- Rapat Evaluasi Capaian Kinerja membahas Progress Fisik dan Keuangan pada Semester I Tahun 2024. Penyerapan Anggaran Dinas pada Semester I Tahun 2024 Sebesar Rp.16.682.126.873,- atau 33.98 % dan Realisasi Fisik sebesar 47,40 % dari Pagu Anggaran Rp. 49.091.421.689,-
- Adapun rincian atas realisasi keuangan pada masing-masing program dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	49.091.421.689		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.026.198.489	9.561.101.609	45.47
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.240.000	53.673.401	36.21
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000		
3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000		
3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000		
3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000		

3.26.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000		
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.240.000		
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000		
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.721.927.589	7.688.818.560	45.93
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.089.927.589		
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.000.000		
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.000.000		
3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.000.000		
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000		
3.26.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.000.000		
3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000		
3.26.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000		
3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	339.875	16.99
3.26.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000		
3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000		
3.26.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000		
3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000		
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.500.000	18.479.750	32.71
3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000		
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500.000		
3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500.000		
3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000		
3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000		
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.629.000	305.106.366	50.38
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.634.000		
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.680.000		
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000		
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.700.000		
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000		
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.950.000		
3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000		
3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	46.665.000		

	SKPD			
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	268.169.000	89.900.000	33.52
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	268.169.000		
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.715.232.900	1.280.579.656	47.16
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	469.932.900		
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.245.300.000		
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.500.000	124.204.001	24.43
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.500.000		
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.000.000		
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.000.000		
3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.465.223.200	3.877.806.440	21.00
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	4.800.000.000	602.354.500	12.55
3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	4.800.000.000		
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	10.214.500.000	2.781.602.290	27.23
3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500.000.000		
3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.200.000.000		
3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.000.000.000		
3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.514.500.000		
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.950.723.200	387.691.000	13.14
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.000.000.000		
3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.950.723.200		
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000.000	106.158.650	21.23
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	200.000.000		
3.26.02.1.04.0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	300.000.000		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.000.000.000	2.022.445.773	33.71
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar		2.022.445.773	33.71

	Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	6.000.000.000		
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.400.000.000		
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	500.000.000		
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.100.000.000		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.000.000.000	269.507.772	26.95
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	700.000.000	206.187.392	29.46
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	700.000.000		
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	300.000.000	63.320.380	21.11
3.26.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	150.000.000		
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	150.000.000		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.600.000.000	951.265.279	36.59
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	2.200.000.000	864.519.579	39.30
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200.000.000		
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.500.000.000		
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	500.000.000		
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	400.000.000	86.745.700	21.69
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000		
3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	200.000.000		
JUMLAH RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		49.091.421.689	16.682.126.873	33.98

KESIMPULAN / ARAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Semester I Tahun 2024 didapati beberapa sub kegiatan yang dinilai sangat kurang dalam serapan anggarannya, hal ini disebabkan :

1. karena adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kurangnya kesiapan teknis masing – masing bidang.
2. karena adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bergeser waktu pelaksanaannya.

Demikian Notulensi ini kami buat dan mohon arahan lebih lanjut.

Serang, 12 Juni 2024

Notulis,

ARIF KURNIAWAN
NIP. 19751011 201411 1 001